

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfianto, S. 2011. *Bunga Rampai Membangun Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan APTIKA dan IKP Balitbang SDM Kemkominfo.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hafiz Tanjung. Abdul. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moloeng, Lexy. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor. Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastro, Dhoha A, dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subagiyo, Henri. 2014. *Buku Pegangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik*. Jakarta: Usaid-Kinerja.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.

Thoha, Miftah. 2010. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Andi Muhammad. Dion. 2016. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Transparansi Di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Adi Negara*. Volume 5 Nomor 5 Tahun 2016.

Ansyari. F. 2014. Implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 dalam Perwujudan Prinsip *Good Governance* di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 , Nomor 4.

Febriananingsih. N. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terebuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 1 Nomor 1 April 2012.

Indah. T & Hariyanti. P. 2018. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*. Volume 12, Nomor 2, April 2018.

Noer Eko. 2016. Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16 No. 2, Juni 2016.

Nupikso. Daru. 2017. Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. Vol. 21 No. 1, Juni 2017

Nurbaiti. Siti. 2008. Mediasi : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesi. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1. Nomor 2 Tahun 2008

- Nurdiansyah. E. 2016 Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. Volume 3, Nomor 2, November 2016.
- Prabowo. Rizki Dwi. 2014. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*. Volume 3, Nomor 3 Tahun 2014.
- Purnawansyah. D & Lestari.Y. 2014. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dprd Kabupaten Sidoarjo. *JKMP* Vol. 2, No. 1, Maret 2014
- Saleh. Luluk. 2010. Keterbukaan Informasi Publik : Perangkat Baru Menciptakan Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No.1, Juni 2010.
- Setiawan. Agus, dkk. 2013. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Kepada Warga Kota). *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, No. 2, Desember 2013.
- Syam. Fauzi. 2015. Hak Atas Informasi Dan *Legal Standing* Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor I, Januari 2015
- Tjoetra. A. dan Sudarman 2017. Peningkatan Kepatuhan Badan Publik Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Community*. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.
- Vian. Gabriel, dkk. 2017. Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 *Tentang Standar Layanan Informasi Publik*

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 *Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*

Website

www.kip.sumutprov.go.id diakses tanggal 17 Desember 2019 jam 08.00

WIB

THE
Character Building
UNIVERSITY